

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Presidential Threshold Berdasarkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan MK No. 70/PUU-XIX/2021 pada Pilpres 2024, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Dampak Presidential Threshold terhadap Keterwakilan Politik
Penerapan presidential threshold dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini lebih menguntungkan partai besar, sementara partai kecil harus berkoalisi untuk bisa mengajukan calon. Akibatnya, keberagaman pilihan kandidat dalam pemilu berkurang, dan hal ini berpotensi menghambat keterwakilan politik yang inklusif
2. Implikasi Putusan MK terhadap Prinsip Keadilan dan Demokrasi
Putusan MK No. 70/PUU-XIX/2021 mempertahankan ketentuan presidential threshold dengan alasan stabilitas pemerintahan. Namun, hal ini menimbulkan pro dan kontra, karena dinilai membatasi hak konstitusional partai-partai kecil dan calon independen dalam mencalonkan diri
3. Alasan Penghapusan Presidential Threshold setelah Pilpres 2024
Setelah Pilpres 2024, muncul dorongan kuat untuk menghapus presidential threshold. Alasan utama adalah pertama, Ketimpangan dalam sistem demokrasi Hanya partai besar yang memiliki keleluasaan mencalonkan presiden, sementara partai kecil kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Kedua Pengurangan alternatif pilihan bagi rakyat dengan hanya dua pasangan calon yang biasanya bersaing, masyarakat kehilangan kebebasan memilih pemimpin yang lebih beragam. ketiga, Meningkatkan partisipasi politik Penghapusan

presidential threshold dapat membuka peluang bagi lebih banyak calon potensial untuk maju, sehingga meningkatkan keterlibatan publik dalam pemilu.

4. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, ketentuan *presidential threshold* ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam politik, terutama terkait keterbukaan, keadilan, dan kebebasan dalam memilih pemimpin. Konsep siyasah dusturiyah menekankan bahwa pemilihan pemimpin harus berdasarkan kemampuan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi umat, bukan karena aturan yang menghambat partisipasi calon potensial. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk merancang sistem pemilu yang lebih representatif dan adil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi *Presidential Threshold* Berdasarkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan MK No. 70/PUU-XIX/2021 pada Pilpres 2024, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Revisi UU No. 7 Tahun 2017 terkait *Presidential Threshold* Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian ulang terhadap Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dengan mempertimbangkan kemungkinan penurunan ambang batas atau bahkan penghapusannya. Revisi ini diperlukan agar sistem pencalonan presiden lebih demokratis, tidak hanya menguntungkan partai besar, tetapi juga memberi kesempatan bagi partai kecil dan calon independen.
2. Membuka Ruang bagi Partai Kecil dan Kandidat Independen Untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, partai kecil sebaiknya diberikan akses yang lebih luas dalam pencalonan presiden. Salah satu opsi yang bisa diterapkan adalah: pertama Menurunkan angka presidential threshold dari 20% kursi DPR atau 25% suara nasional menjadi 10-15% agar lebih banyak partai yang bisa mencalonkan

kandidat. Kedua, Menghapus *threshold* bagi calon independen, sehingga warga negara yang memiliki elektabilitas tinggi bisa ikut serta dalam pemilu tanpa harus terikat dengan partai politik.

3. Meningkatkan Partisipasi Publik dan Pengawasan dalam Reformasi pemilu , Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan pemilu agar sistem pemilu lebih transparan dan mencerminkan kepentingan rakyat. Edukasi politik yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak presidential threshold terhadap demokrasi. Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus diperkuat dalam mengawasi kebijakan pemilu agar tetap adil dan demokratis.
4. Evaluasi Peran Siyasah Dusturiyah dalam Sistem Pemilu Indonesia Untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas politik dan demokrasi inklusif, perlu dikaji lebih dalam bagaimana penerapan prinsip siyasah dusturiyah dalam sistem pemilu Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kriteria keadilan, kemaslahatan umat, dan kemampuan, bukan hanya berdasarkan kepentingan partai besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, A. N. (2023). Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki. *JURNAL RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi ManusiA Vol 5 No 1*.
- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan pengawasan . *Jurnal Inspirasi BPSDM Provinsi Jawa Barat Volume 10 Nomor 1*.
- Ahmad Muhammad. (2020). *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta.: UII Press .
- Ahmad Yusril Aziz, D. B. (2024). Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Yurijaya jurnal ilmiah hukum , Vol. 7 No. 1,*.
- Alex Cahyono, A. I. (2023). Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Normatif Di Indonesia. *Jurnal Supremasi, Ilmiah Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 2*.
- Ambarwati, S. D. (2020). Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Lex Generalis vol 5 no 1*.
- Antameng. (2019). Implikasi Presidential Threshold Terhadap Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Lex Administratum. Jilid 7*.
- ariyadi, A. (2024). Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik. *Jurnal Kewarganegaraan, vol 8 no 1*.
- Armia, M. S. (2016). Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hakhak Konstitutional. *Petita Volume 1 No 2 Oktober*.

- Arrsa, R. C. (2018). Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *jurnal konstitusi volume 11 no 3*.
- Arsil, S. A. (2022). Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem multipartai Sederhana Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 2 No. 1*.
- Aulawi, R. R. (2021). Analisis Keadilan dalam Penerapan Presidential Threshold bagi Partai Politik Baru. *Jurnal Hukum dan Keadilan vol 18 no 2*.
- Aziz, M. (2021). Pengarus ambang batas pencalonan presiden terhadap dinamika partai politik di indonesia . *jurnal ilmu pemerintah :kajian pemerintahan dan politik daerah ,vol 4 no 1*.
- Bancin, K. A. (2024). Implikasi Penerapan Presidential Threshold Terhadap pemilihan Presiden & Wakil Presiden Dan Partai Politik Pada Pemilu Serentak 2024 Di Indonesia 2024. *skripsi falutas hukum universitas ahmad dahlan*.
- Baskoro, A. (2019). Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal LEGISLATIF, Vol. 2, No. 2, Juni*.
- Bernard, T. (2021). *politik hukum agenda kepentingan bersama*. yogyakarta: genya publishing.
- Bryson, J. M. (2018). *strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. 5th Edition*. Hoboken,: NJ: John Wiley & Sons.
- edi Sofwan, D. H. (2023). Efektivitas Konsep Presidential Threshold Dalam Penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Kompetisi Pemilihan Umum di Indonesia. *Pamulang Law Review*.
- Edwards, G. C. (2018). *mplementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

- Efendi, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Effendi. (2018). Presidential Threshold Dan Stabilitas Politik Di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia, Volume 10 Nomor 2*.
- Evelina, W. (2019). Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2019. *Jurnal Humaniora, Volume 6, Nomor 1*, .
- Fadilah, S. (2021). *Dinamika Kampanye Politik: Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pemilu*. Bandung: ITB.
- Fadlillah, I. (2022). Threshold Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, Juni*.
- Fadoly, A. (2020). Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia.
- Fahmi, K. (2017). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4*.
- Faramadinah Rahmiz, d. H. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No. 1*.
- Fikri, S. (2022). Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum, vol 7 no 1*.
- Firdina, Z. (2017). Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. *Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4, Desember*.
- Fisher, A. (2019). *Election and Political Campaigns: An Implementation Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fuqoha. (2017). Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2* .
- Gaffar, J. M. (2018). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Gobel, R. T. (2019). Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. *ambura Law Review, vol 1 no 1*.
- Halim, A. (2019). *Sistem Pemilu di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Halim, F. (2019). *Analisis Kebijakan Pemilu dan Implementasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanan, D. (2025). liputan 6 . *Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold 20%: Siapa Untung? Prabowo, Jokowi atau Anies? di akses pada tanggal 5 februari 2025*.
- Harlian Satria Wilwatikta, F. R. (2025). Efektivitas Sistem Threshold dalam Presidential Threshold di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Volume. 2 Nomor. 1 Januari*.
- Harsono, H. (2018). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hasibuan, I. I. (2023). Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Presidential Threshold (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017-2022). *Res Publica Vol. 6 No. 3*.
- herjunanto, D. (2020). Analisis yuridis regulasi ambang batas (*presidential treshold*) sebagai *open legal policy* dalam hak untuk dipilih dan memilih calon presiden dan wakil presiden. *skripsi, fakultas ilmu hukum dan sosial ,universitas negeri surabaya*.
- Heydir, M. R. (2024). Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Simbur Cahaya Vol 13 No 2*.
- Hidayatullah, G. G. (2024). Perbandingan Sistem Pemilu Di Negara-Negara Barat: Analisis Model, Keunggulan Dan Kelemahan. *Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.4, No.1*.
- Huda, N. (2017). *Ilmu Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Hutabarat, P. K. (2020). Political Party Debate on the Presidential Threshold System in the Multi-Party Context in Indonesia. *Proceedings of the 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019), Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Imawan Sugiharto, E. A. (2022). Examining the Legal Impact of Presidential Threshold Implementation in the 2024 Presidential Election. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 22 Issue 2, May*.
- Ismail, M. (2019). *Partisipasi Politik dan Pemilu Inklusif: Studi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- istijab. (2024). Presidential Threshold: Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Yurijaya vol 1 no 1*.
- Kartini, D. (2022). Koalisi Politik dan Implementasi Presidential Threshold di Indonesia. *Jurnal Politik Nusantara, Vol. 8, No. 1*.
- kasmad, R. (2018). *Studi implemtasi kebijakan publik*. Makasar: Kedai aksara.
- Khoiriyah, N. K. (2023). Tinjauan Terhadap Kebijakan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia. *jurnal gema keadilan vol 3 no 3*.
- Konstitusi, M. (2024). Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial Vol 21 No. 2*.
- Kuswanto. (2024). Human Rights Perspective on Implementing Presidential Threshold in Indonesia. *US POSITUM:Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 3, Issue. 1, January*.
- Liando, F. D. (2024). *Strategi Penguatan Kelembagaan Menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024*. Jakarta : Bawaslu DKI jakarta.
- Mahfud. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Mahfud. (2020). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Marwanto. (2020). *Demokrasi Kerumunan (Bunga Rampai tentang Demokrasi, Pemilu dan Budaya Politik)*. Yogyakarta: guepedia.
- Marzuki. (2005). *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mega Setya Utami, A. R. (2024). Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-Xxi/2023). *Jurnal Hukum Kebijakan Publik vol 8 No 3*.
- MK konstutusi, M. (2024). Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- MK, P. (2024). Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- MK, P. M. (2020). *Nomor 48/PUU-XVIII/2020*
- Mohammad Akbar, M. R. (2023). indonesia's Presidential Threshold: An Analysis of Legal and Political Dynamics. *Jurnal Mengkaji Indonesia, vol 2 no 2*.
- Muh Khamdan. (2022). *Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa Kontestasi dalam Politik Elektoral di Indonesia*. Serang: Penerbit A-Empat.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhamad, P. P. (2020). Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 Dan Implikasinya Bagi Dunia. *Bidang Hubungan Internasional Vol. XII, No. 21*.
- Muhammad Faishal Rizqullah, P. A. (2024). Dampak Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024. *Journal Politique Volume 4, Number 1, January*.

- Muhammad Iqbal. (2022). Analisis Putusan Uji Materi Presidential Threshold di MK: Studi Kasus 2004–2022. *Jurnal Konstitusi Indonesia, Vol. 15, No. 3*.
- Muhammad Rafy, E. H. (2023). Penerapan Sistem Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia. *Otentik Law Journal Vol 1 No 1 januari*.
- muhammad, B. (2024). Implikasi Penerapan Presidential Threshold terhadap Pemilihan Presiden & Wakil Presiden dan Partai Politik pada Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. *Jurnal Hukum vol 7 no 2*.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Nasution, M. (2018). *Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Nugroho, A. (2018). Dinamika Partai Politik dan Kebijakan Ambang Batas di Indonesia. *Jurnal Politik Kontemporer Vol 10 No 1*.
- Prasetyo, A. (2021). Dampak Aturan Presidential Threshold dalam Pemilu Presiden di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*.
- Pratama, I. S. (2022). Examining the Legal Impact of Presidential Threshold. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 22 Issue 2*.
- Pratama, M. M. (2025). Efektivitas Sistem Threshold dalam Presidential Threshold di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Volume. 2 Nomor. 1 Januari*.
- Pratama, R. (2023). Abadinya Persoalan Presidential Threshold Di Meja Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Penelitian Multidisplin Vol.2 No.1 Februari*.
- Purnama, Y. A. (2020). Eksistensi Parliamentary Threshold dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat. *Skripsi*.

- Putra, D. (2017). Kualitas Kandidat dalam Pemilu: Peran Ambang Batas dalam Demokrasi. *Jurnal Demokrasi Vol 8 No 3*.
- Raden, S. (2021). Penyerdehanaan Surat Suara Pemilu Dalam Presfektif Sistem Pemilu Dan Pemerintahan Presidensial. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1*.
- Rafy, M. (2022). Penerapan Sistem Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia. *Skripsi*.
- Rahayu, S. W. (2022). Ambang Batas Pemilu dan Implikasinya terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Demokrasi Vol 8 no 2*.
- Ramadhan, S. d. (2019). Presidential Threshold in the Presidential Election: A Democratic and Constitutional Study. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 363 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies*.
- Rizal, M. (2021). Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi UIN Ar-Raniry. *Skripsi*.
- santoso, b. (2023). Implementasi presidential threshold dalam pilpres 2024: keseimbangan antara stabilitas politik dan partisipasi publik . *jurnal politik kontemporer*.
- Santoso, D. (2021). *Pemilu dan Partisipasi Politik*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Saraswati, Y. D. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1*.
- Setiawan, A. E. (2024). Memahami Ambang Batas Presidensial Indonesia: Sebuah Studi tentang Hak Politik. *Jurnal Mengkaji Indonesia vol 3 No 1*.

- Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Japhtn-Han Volume 2 No 1*.
- Setiawan, R. (2021). Parliamentary Threshold dan Pengaruhnya terhadap Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia Vol 12 no 1*.
- Simatupang, P. (2020). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik Volume 2 No. 1*.
- siregar, M. (2018). peran threshold dalam meningkatkan kualitas calon legislatif di indonesia . *jurnal politik hukum* .
- siswanto, J. (2020). *kamus lengkap 200 juta*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soselisa, D. L. (2024). Pattimura Magister Law Review Vol 4 No 1. *Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, B. (2018). *Sistem Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Demokrasi,.
- Sultoni Fikri, B. R. (2022). Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum Vol.7, No.1, Juli*.
- Sultoni Fikri, B. R. (2022). Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1*.
- Sumodiningrat, A. (2020). Implikasi Presidential Threshold terhadap Fragmentasi Partai Politik di Parlemen. *Jurnal Ilmu Politik, Vol 15 no 2*.
- Surbakti, R. (2021). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. . Bandung: Nusamedia.

- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Tika Puspita Sari, Y. S. (2023). Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold. *Politica:Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 10, No. 2*.
- Umagapi, J. L. (2022). Wacana Penghapusan Presidential Threshold. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. XIV, No.6/II/Puslit/Maret/2022*, 1-2.
- Usman, N. (2019). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Wahab, S. A. (2019). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warjiyati, S. (2019). Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik Vol 12 No 1*.
- Wijaya, A. R. (2020). Stabilitas Politik dan Fragmentasi Parlemen di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Vol 14 No 2*.
- Winarno., B. (2018). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yonnawati, u. L. (2020). Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol. 1, No. 1.*